BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2022 Indonesia diwarnai dengan gelombang baru kasus covid-19 akibat penyebaran Varian Omicron, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini diharapkan lebih baik lagi, karena telah diketahui bahwa di tahun 2021 perekonomian Indonesia semakin membaik dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 Covid-19 kembali meningkat dengan munculnya varian jenis baru yaitu Omicron yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Varian Omicron sangat mengancam masyarakat karena berdasarkan World Health Organisation (WHO) per tanggal 23 Desember 2021 menyebutkan tingkat penularan Omicron lebih cepat dibandingkan varian covid-19 sebelumnya, Varian Omicron dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibandingkan dengan variann lainnya. Dilansir dari (cnbcindonesia.com, 2022), "Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas diluar rumah". Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemda dalam mengelola keuangan daerahnya dan juga memicu mobilitas masyarakat kembali berkurang yang akan berpangaruh pada perekonomian di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan.

Mulanya Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun 2020 dimana dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan mengatakan "karena adanya covid-19 dan adanyanya prioritas yang lebih ditujukan kepada Kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi diperkirakan belanja modal akan mengalami perlambatan" (kemenkeu,go,id). Upaya ini juga disampaikan Saat rapat koordinasi percepatan ekonomi nasional di Polda Sumsel, Pemerinah Provinsi (Pemprov) Sumsel meminta kabupaten dan kota di Sumsel untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial

(bansos). Herman deru mengatakan “Wali kota dan bupati diharapkan tidak perlu ragu menggunakan anggaran belanja modal untuk penyaluran bantuan sosial” (kumparan.com,2021). Upaya ini sebagai langkah pihaknya terhadap penanganan penyebaran virus covid-19, termasuk penyediaan masker, APD dan vaksinasi. Selain itu, pihaknya Bersama aparat mengajak dan meningkatkan tentang penggunaan anggaran terutama terkait bantuan sosial.

Realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah bahkan masih ada yang dibawah 50%. 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Diantaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen. Sementara serapan belanja tertinggi dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan capaian 78,69 persen. Disusul OKU Selatan 60,61 persen, OKU Timur 55,88 persen, Musi Rawas 53,35 persen, Kota Pagar Alam 52,11 persen, Kabupaten OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, OKI 50,92 persen dan Provinsi Sumsel 50,23 persen. Dilansir dari (mediaindonesia.com, 2022), “Kepala Kanwil DJPb sumsel, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, salah satu kunci pemulihan ekonomi ini adalah belanja Pemerintah. Untuk itu, kami mendorong pemda agar bisa segara merealisasikan belanja daerah terutama untuk barang dan jasa”. Minimnya serapan belanja tersebut sangat mempengaruhi situasi perekonomian daerah, karena saat ini belanja daerah sangat dibutuhkan agar terjadi transaksi di tengah masyarakat. Berikut perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Data Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	790.130.000.000
2017	1.108.080.000.000
2018	1.375.070.000.000
2019	1.405.120.000.000
2020	1.392.760.000.000

Sumber: djpk.go.id (Data diolah, 2022)

Melalui tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2019 realisasi Belanja Barang dan Jasa terus meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020 Belanja Barang dan Jasa menurun. Penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan penyediaan barang dan jasa masyarakat pada umumnya mengalami penurunan yang signifikan.

Dampak dari Pandemi ini memungkinkan memerlukan tempat dan berbagai macam keperluan untuk pengobatan secara mendesak, mengingat ancaman Varian Omicron membutuhkan respon cepat agar dapat mencegah penularan berkelanjutan. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus segera merealisaikan belanja daerah yaitu belanja tidak terduga guna mengantisipasinya. Belanja tak terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dilansir dari (Gatra.com, 2022), “Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori mengatakan guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya

yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Akhir (TA) 2022 sebesar 5%-10% dari APBD Tahun Akhir (TA) 2021". Berikut perbandingan realisasi Belanja Tidak Terduga Sumatera Selatan dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.1 Data Realisasi Belanja Tidak Terduga

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020.

Tahun	Realisasi (Rp)
2016	180.000.000
2017	790.000.000
2018	130.000.000
2019	4.070.000.000
2020	197.100.000.000

Sumber: djpk.go.id (Data diolah, 2022)

Melalui tabel 2.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2019 realisasi Belanja Tidak Terduga terus meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020 realisasi Belanja Tidak Terduga melonjak sangat besar. Hal ini menunjukan bahwa covid-19 sangat mempengaruhi serapan anggaran Belanja Tidak Terduga di Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, mengatakan "secara total bahwa realisasi pendapatan APBD Pemda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Dimana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun. Sementara itu untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan" (mediaindonesia.com, 2022). Kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerahya masing-masing, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisisakan dengan optimal, mengingat kondisi ekonomi sekarang kembali

menurun perlu segera melakukan percepatan serapan belanja daerah, sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Klasifikasi kode belanja daerah terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam penelitian ini belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga sedangkan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditelah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh yang akan diberikan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan mangangkat judul **"Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah belanja tidak terduga berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pengelolaan keungan daerah?

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan daerah?
5. Apakah belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka akan penulis batasi pada pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak terduga, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah dibatasi pada rasio pertumbuhan kinerja. Data yang digunakan tahun 2016-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Tidak Terduga terhadap Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

4. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan

5. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.